

PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Fakhri Akhdan Toedien

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Research looked at surveillance conducted by the inspectorate Bengkalis against local work units (SKPD) in Bengkalis in the year 2015. In an effort to conduct surveillance, the inspector will check every job generated by SKPD districts Bengkalis. Testing can be through documents owned or perform or do a SKPD is. This research is conducted using qualitative methods descriptive approach for easier consideration when faced with the reality in the field problems. Results obtained from this study in terms of the inspectorate in examinations have insufficient time in one year examination. Inspectorate so could not do SKPD that exist in the county Bengkalis, Supposedly each examination should be clear regulations the time up until the completion of the beaten path and all working units can be checked. budget Inspection Inspectorate on local work unit Bengkalis use travel budgets are taken from the budget, in accordance with the regent regulation number 64 in 2015 on the implementation of the instructions of official travel environment Bengkalis. Jumlah District government employees in the Inspectorate could balance out as expected, in the Inspectorate shortage the number of employees, especially its auditors so that the discrepancy between the number of auditors is in Bengkalis District Inspectorate with the number of units of the existing regional work.

Abstrak: Penelitian ini melihat pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2015. Dalam upaya melakukan pengawasan, pihak inspektorat akan memeriksa setiap pekerjaan yang dihasilkan oleh unit-unit kerja yang ada di SKPD Kabupaten Bengkalis. Pemeriksaan yang dilakukan dapat melalui dokumen yang dimiliki atau melakukan atau melakukan tanya jawab kepada pegawai dalam SKPD tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif karena pertimbangan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan permasalahan di lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian dalam hal ini inspektorat dalam melakukan pemeriksaan memiliki waktu yang kurang cukup dalam satu tahun pemeriksaan, sehingga inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan kepada seluruh SKPD yang ada. Semestinya setiap pemeriksaan harus ada ketentuan yang jelas waktunya hingga sampai ke jalan penyelesaian dan seluruh SKPD bisa diperiksa. Anggaran Pemeriksaan Inspektorat pada SKPD Kabupaten Bengkalis menggunakan anggaran perjalanan dinas yang diambil dari APBD, sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jumlah pegawai di inspektorat bisa menyeimbangi seperti yang diharapkan, kekurangan jumlah pegawai khususnya auditornya sehingga terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah auditor yang ada dengan jumlah SKPD yang ada.

Kata Kunci: SKPD, pengawasan inspektorat, auditor

PENDAHULUAN

Paradigma pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah bergeser dari pemeriksaan yang menitikberatkan pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan operasional ke pemeriksaan yang menitikberatkan pada kinerja instansi. Inspektorat melakukan pengawasan internal terhadap pemerintahan dengan tugas pokok dan fungsi mengawasi, membina satuan kerja perangkat daerah melalui pemeriksaan terhadap aspek tugas dan fungsi keuangan, sarana dan prasarana dan metode kerja dengan penekanan pada prinsip ekonomis yang efektif dan efisien dalam men-

cegah terjadinya penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan daerah dan negara.

Sampai dengan 31 Desember 2015 jumlah temuan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.117 temuan dengan jumlah saran sebanyak 1.438 saran. Temuan yang telah selesai ditindaklanjuti 710 saran, sedangkan dalam proses penyelesaian ada 114 saran, dan yang belum ditindaklanjuti dikarenakan ada berbagai kendala yang menghambat sebanyak 614 saran. Dari temuan tersebut dapat dikisarkan dengan nilai Rp.4.676.725.714,00. Telah ditindaklanjuti sebesar Rp.1.596.573.274,00

dan sisanya Rp.3.080.152.440,00. Dengan banyaknya sisa yang kasus dan anggaran yang belum terselesaikan, maka semakin jelas pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan inspektorat terdapat hambatan.

Penyelesaian temuan bisa juga dilakukan dengan cara sosialisasi pertemuan yang dilakukan oleh inspektorat secara berkala atau priodik dengan kegiatan monitoring, evaluasi, atau gelar pengawasan. Apabila ada temuan yang tidak diselesaikan, maka diambil langkah dengan melakukan sidang melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) negara atau daerah yang beridang minimal satu kali dalam satu tahun. Untuk kegiatan 2015 pemeriksaan masih dilanjutkan di tahun 2016 dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai Keputusan Bupati Bengkalis nomor 554/KPTS/XII/2015/29 Desember 2015 tentang program kerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Bengkalis banyak mendapat hambatan dari berbagai faktor. Sebagai suatu instansi yang setara dengan kedudukannya dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, inspektorat sulit untuk bersifat netral dan tanpa tekanan. Begitu juga dengan penemuan dari hasil pengawasan yang dilakukan kepala daerah masih belum dapat berlaku tegas ataupun memberikan sanksi kepada satuan kerja perangkat daerah yang menyalahgunakan kewenangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena pertimbangan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan permasalahan di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori manajemen, organisasi, dan pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Inspektorat terhadap SKPD Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah

Tinjauan terhadap inspektorat menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi dalam penelitian

ini tidak semua hal dapat penulis ambil dan diteliti. Pada proses *pertama*, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasarkan standar tersebut kemudian diadakan penilaian. Sedangkan proses. *Kedua* yakni evaluasi, yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan (*actual result*) dengan standar tadi. Bila tidak mendapat kesamaan artinya aktual *result* tidak sama dengan standar, maka proses. *Ketiga* yaitu *corecction action* yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat realisasi.

Badan Penelitian dan Pengembangan lebih dominan pada temuan administrasi seperti kegiatan dan perjalanan dinas. Dari hasil pemeriksaan 2015 masih belum terselesaikan, sampai saat ini tahun 2017. Disini jelas bahwa dalam menyelesaikan belum ada ketegasan yang dibuat inspektorat kepada satuan kerja perangkat daerah yang diawasinya, sehingga sisa kerugian masih cukup besar dan sampai sekarang penyelesaiannya tidak terselesaikan.

Temuan pihak inspektorat yang berbentuk administrasi di Badan Penelitian dan Pengembangan akan diserahkan kepada pelaku penyalahgunaan dan dievaluasi untuk cari jalan keluarnya. Bahkan temuan pemeriksaan tidak langsung harus diterima oleh pihak yang diawasi, Balitbang akan evaluasi terlebih dahulu temuan barulah nanti akan diselesaikan menurut temuan dan Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP) sesuai standar dan prosedur yang ada, evaluasi sangat dibutuhkan karena bisa saja yang sudah diselesaikan tidak terlampir dalam pemeriksaan. Kewenangan ini juga kondisi yang membuat inspektorat hanya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada.

Terdapat 7 temuan dari 12 yang belum diselesaikan, temuan yang sudah diselesaikan berdasarkan yaitu temuan berbentuk administrasi seperti perjalanan dinas dan ada beberapa kegiatan. Dari hasil pengawasan tim dari Inspektorat dalam melakukan tindakan perbaikan mengikuti aturan yang ada. Pada pemeriksaan tahun 2015 tindakan perbaikan dilakukan melalui setor langsung ke rekening pemerintah daerah melalui Bank Riau Kepri, dengan prosedur yang ada.

Dinas Pendidikan

Dalam upaya melakukan pengawasan, pihak inspektorat akan memeriksa setiap pekerjaan yang dihasilkan oleh unit-unit kerja yang ada di SKPD Kabupaten Bengkalis. Pemeriksaan yang dilakukan dapat melalui dokumen yang dimiliki atau melakukan atau melakukan tanya jawab kepada pegawai di dalam SKPD tersebut. Tujuan pemeriksaan ini untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dari pencapaian standar kinerja yang sudah ditetapkan. Sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat dijadikan bahan bagi SKPD untuk mengevaluasi.

Pemeriksaan pada anggaran 2014 dan dilakukan pemeriksaan pada tahun 2015 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis ada beberapa temuan seperti temuan pada kegiatan disaat auditor melakukan pengawasan. Ada juga hal yang berbentuk saran, saran ini didapat dari kotak saran yang ada pada tiap kecamatan dan dievaluasi hasil dari saran tersebut oleh pihak inspektorat.

Pengawasan yang dilakukan pihak inspektorat pada dinas pendidikan tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Standar untuk melakukan pemeriksaan tetap menggunakan standar operasional prosedur inspektorat dan melalui surat perintah tugas bupati Bengkalis Nomor : 700/ITKAB-SE/1/2015/13 tanggal 27 Januari 2015 dan Surat perintah tugas Bupati Bengkalis Nomor : 700/ITKAB-SE/2015/18 tanggal 6 Februari 2015 tentang penambahan hasil pemeriksaan. berdasarkan pogram kerja pengawasan tahunan (PKPT 2015) inspektorat kabupaten bengkalis sesuai keputusan bupati bengkalis nomor 471/KPTS/XII/2014

Kejelasan dalam standar bekerja haruslah jelas dan penambahan jumlah auditor inspektorat masih diharapkan oleh setiap satuan kerja. Inspektorat sesuai dengan beban kerja yang sangat berperan aktif terhadap pemerintahan daerah harus dijalankan oleh orang yang memiliki keahlian bukan hanya kinerja biasa. Juga tidak meletakkan seseorang pada tempatnya dan jabatan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sehingga menurut peneliti terjadi ketimpangan jabatan dan posisi seseorang khususnya pada Inspektorat sehingga apa yang

dikerjakan memakan waktu lama karena ada hal yang auditor tidak mengerti harus mempelajari terlebih dahulu

Sekretariat Daerah Bagian Keuangan

Pengawasan yang dilakukan auditor pada inspektur pembantu III terhadap sekretariat daerah tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Temuan pada bagian keuangan tidak ada proses penyelesaian sampai dengan tahun 2017. Dari temuan yang tidak diselesaikan tersebut terdapat adanya kejanggalan terhadap prosesnya, sehingga sisa temuan hanya dibiarkan saja dan hanya terpapar didalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pada proses pengawasan di bagian keuangan sekretariat daerah sama dengan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) inspektorat dan tidak ada perbedaan dalam tahap pengawasannya. Tetapi dalam proses di lapangan kendalanya banyak terjadi kendala. Dari laporan pemeriksaan yang seharusnya cepat di tanggapi oleh bupati tetapi ini terjadi keterlambatan.

Dari hasil lapangan dapat diketahui pada bidang keuangan di sekretariat daerah sudah menyarankan agar temuan diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan sepertinya tidak begitu memperhatikan kesalahannya. Lagi-lagi setelah di evaluasi dalam temuan inspektorat masih terdapat ancaman besar bagi auditor dalam melakukan pengawasannya, ancamannya masih sekitar jabatan struktural, dan tidak mempertahankan dari hasil temuan melainkan para auditor lebih baik mencari jalan yang aman baginya. Mengenai hal tersebut penulis juga menanyakan hal berkaitan dengan yang menjadi ancaman

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Inspektorat

Waktu Pemeriksaan

Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan memiliki waktu yang cukup baik sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. Dalam melakukan pemeriksaan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), akan tetapi kelemahan nya dari waktu yang sudah ada dalam satu tahun pemeriksaan

inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada. Seharusnya setiap pemeriksaan harus ada ketentuan yang jelas waktunya hingga sampai kejalan penyelesaian dan seluruh satuan kerja perangkat daerah bisa diperiksa.

Anggaran Pemeriksaan

Pemeriksaan Inspektorat pada SKPD Kabupaten Bengkalis menggunakan anggaran perjalanan dinas yang diambil dari APBD, sesuai dengan peraturan Bupati nomor 64 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Sumber daya manusia (Auditor)

Jumlah pegawai inspektorat dalam beberapa wawancara dan penelitian diakui cukup. Akan tetapi tidak seperti yang diharapkan, di Inspektorat kekurangan jumlah pegawai khususnya auditornya sehingga terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah auditor yang ada pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan jumlah Satuan kerja perangkat daerah yang ada.

Sarana dan prasarana

Inspektorat Kabupaten Bengkalis memiliki sarana dan prasarana yang cukup akan tetapi terjadi ketidak harmonisan hubungan antara Inspektur dan pegawainya sehingga banyak terjadi masalah internal di lingkup inspektorat itu sendiri.

SIMPULAN

Pada tahap melakukan pengawasan standar yang ada di Inspektorat sudah ada tetapi kejelasan dari standar nya belum jelas dan masih ada pihak auditor yang tidak mengikuti prosedur dalam bekerja karena terdapat tekanan jabatan dari pihak penguasa. Dalam tahap evaluasi temuan pihak inspektorat tidak ada kekuatan untuk menindak hasil temuannya dikarenakan hasil temuan harus dilaporkan kepada bupati dan keputusan masih di tangan bupati. Dalam tindakan perbaikan terhadap temuan di satuan kerja perangkat daerah masih lemah sehingga tidak semua temuan terselesaikan setiap tahunnya masih terdapat beberapa temuan yang tidak

ditindak lanjut dan kerugian daerah setiap tahun terus bertambah. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat terhadap satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis selain disebabkan oleh belum jelasnya standar pengawasan, minimnya tahapan evaluasi pengawasan, serta kurangnya tindakan perbaikan terhadap temuan dan juga dipengaruhi oleh salah satu faktor dari terbatasnya sumberdaya manusia (auditor) yang ada di Inspektorat Kabupaten Bengkalis

DAFTAR RUJUKAN

- Novita Lerly Djiloy, *Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi*. e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 6, Juni 2016 hlm 70-82 ISSN: 2302-2019 Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako
- Mohamad Adiguna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Bogor)*. e-Journal Aplikasi Manajemen | VOLUME 13 | NOMOR 1 | MARET 2015 Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Arif Satria, Gendut Suprayitno, Institut Pertanian Bogor.
- Sumarno, 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Inspektorat Sebagai Internal Auditor fi Kabupaten Luwu. *Journal Equilibrium*, Vol. 3, No.2.
- Sandi Hasudungan Pasaribu, 2015. *Pengaruh Kecakapan Profesional Independensi Dan Lama Bekerja Terhadap Hasil Pemeriksaan Auditor Internal Pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal riset akuntansi dan auditing Vol. 6.
- Sri Mifti, *Pengawasan Internal Dan Kinerja (Suatu kajian di kantor Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri)*, Jurnal Ekonomi Bisnis No. 3 Vol. 14, Agustus 2009 Pasca Sarjana Akuntansi Pemerintahan, Universitas Gunadarma